

BAB III

TUNTUTAN INTERNAL TERHADAP PEMERINTAH MYANMAR

Bab ketiga ini akan menguraikan tentang beberapa tuntutan dan desakan dari dalam sistem politik, yaitu lingkungan internal. Beberapa komponen dalam sistem politik, meliputi: kelompok kepentingan (*interest group*), dan kelompok partai politik menyikapi adanya tuntutan internal tersebut.

A. Tuntutan Kelompok Kepentingan (*Interest Group*) dalam Menyelesaikan Konflik Rohingya

Berbagai macam kepentingan dapat kita kemukakan pada setiap masyarakat dimanapun berada. Kepentingan-kepentingan tersebut pada hakekatnya merupakan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan yang diharapkan dapat terpenuhi.⁶⁰

Kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut diartikulasikan atau dikemukakan oleh berbagai macam lembaga, badan atau kelompok dengan berbagai macam cara dan fungsi artikulasi ini biasanya dilakukan oleh interest group atau kelompok kepentingan.⁶¹

Ada beberapa kelompok kepentingan yang terdapat di internal Myanmar sendiri yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Myanmar dalam mengambil sikap antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶⁰ Drs. Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm 50

⁶¹ *Ibid*, hal.51

1. Kelompok Mayoritas Budha Myanmar

Myanmar sebagaimana yang telah diketahui ialah wilayah yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Budha. Pendeta-pendeta Buddha (pongyi) selalu menjadi bahan pertimbangan keputusan dari para raja-raja Burma sejak jaman pra kolonial. kekuatan Buddha ini lantas menjadi kekuatan yang utama dalam nasionalisme Burma. Burma juga merupakan suatu contoh pergerakan nasionalisme Asia Tenggara yang digerakan oleh Budhisme. Buddha memang telah menjadi agama yang mengakar kuat dalam masyarakat Burma. Agama ini memang telah memiliki peran penting dalam menentang imperialisme dan kolonialisme dari Inggris sehingga menciptakan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme yang didengungkan oleh para pendeta Buddha tak hanya didengar dari para pengikut Buddha yang taat saja, namun juga dari para pelajar dari universitas yang cenderung sekular dan bahkan dari parati politik yang beraliran Marxist.⁶²

Tidak heran jika pemerintah mendapat tekanan dari kelompok mayoritas Budha ini karena populasinya yang mencapai 2/3 dari total warga Myanmar⁶³. Etnis Burmese yang merupakan penganut Budha menduduki posisi-posisi penting di Myanmar. bahkan partai berkuasa USDP merupakan partai dengan mayoritas Budha. Maka tidak heran jika pemerintah cenderung mengakomodir kepentingan kaum mayoritas.

⁶² Frial Ramadhan, *Budhisme dan Nasionalisme di Burma*, <http://humaniora.kompasiana.com/sejarah/2011/06/17/2/373697/budhisme-dan-nasionalisme-di-burma.htm>, diakses pada 20 Maret, 2012

⁶³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>

Dengan mencuatnya konflik rohingya ini, maka kebijakan yang diambil pemerintah pun tidak lepas dari tekanan yang diberikan oleh kelompok mayoritas yang ada. Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media massa, bahwasannya, kelompok mayoritas Budha menginginkan pengusiran terhadap etnis Rohingya. "Muslim Rohingya bukanlah kelompok etnis Burma. Mereka akar penyebab kekerasan," kata salah seorang pemimpin biksu, Ashin Htawara dalam sebuah acara di London.⁶⁴ Salah seorang demonstran yang melakukan aksi untuk, menolak keberadaan etnis Rohingya pada 2 september 2012, mengatakan "Biarkan dunia tahu Rohingya tidaklah termasuk dalam kelompok etnis Myanmar sama sekali," kata dia kepada kantor berita AFP.⁶⁵

2. Militer Myanmar

Pada akhir dekade 90-an, junta militer menguasai politik Myanmar dan segera membentuk *State Of Law and Order Restoration Council* (SLORC) diikuti dengan penyelenggaraan pemilihan parlemen. Walaupun pemilihan ini mengunggulkan Aung San Suu Kyi dari partai oposisi tetapi junta menolak mengakui kemenangan tersebut. sebaliknya, junta militer justru melakukan penangkapan dan pembersihan politik dari unsur-unsur oposisi. Sudah barang tentu pelanggaran HAM besar-besaran menjadi tak terelakan.⁶⁶

⁶⁴ *Siapa Bilang Biksu Penuh Cinta Kasih, di Rohingya Mereka Menyebar Kebencian Terhadap Ummat Islam, Suara-Islam.com, <http://www.suara-islam.com/read/index/5041/Siapa-Bilang-Biksu-Penuh-Cinta-Kasih--di-Rohingya-Mereka-Menyebar-Kebencian-Kepada-Umat-Islam>, 27 Juli 2012*

⁶⁵ *Biksu Myanmar Desak Muslim Rohingya Diusir, republika, 3 September 2012*

⁶⁶ *Dr. Bambang Cipto, MA, Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010, hal. 70*

pemerintah pusat, yang didominasi oleh etnis Burma, melakukan burmaisasi kelompok-kelompok etnis yang ada. Proses asimilasi yang dicanangkan pemerintah pusat mengakibatkan perlawanan fisik dan militer dari etnis-etnis minoritas yang menentang dominasi etnis Bamar. Mereka menentang prospek penghapusan budaya mereka sendiri oleh rezim militer Burma.⁶⁷ Etnis minoritas yang merasa terancam melakukan perlawanan militer melawan aparat militer pemerintah pusat. Tak terkecuali etnis Rohingya. Etnis Rohingya beberapa kali pernah mendirikan aliansi untuk menjamin kepentingan masyarakat muslim, terutama jaminan status keanggotaannya. Namun usahanya sia-sia. Bahkan militer melakukan pembunuhan ratusan ribu muslim Rohingya dan dipaksa mengungsi ke Bangladesh.⁶⁸ Mereka merasa tidak puas dengan pemerintahan militer Burma.

Semestinya Myanmar harus menjaga komitmennya terhadap demokrasi, bukan hanya secara prosedural dengan membolehkan oposisi Aung San Su Kyii untuk pemilu saja, tetapi jauh lebih penting adalah demokrasi substansial, yang terkait erat dengan HAM khususnya hak hidup Etnis Rohingnya. Militer yang semestinya menghentikan pertikaian, justru turut andil pada kekerasan terhadap etnis Rohingnya. Militer juga telah terlibat melakukan penghasutan pada masyarakat sekitar di Rakhine untuk melakukan penyerangan. Hal ini menunjukkan kewenangan militer telah berubah dengan menjadikan Rohingnya sebagai target kekerasan.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 159

⁶⁸ *Ibid*, hal. 70

3. Etnis Rakhine

Sikap kebencian dan permusuhan yang ditanamkan oleh kelompok mayoritas (etnis Rakhine) terhadap eksistensi etnis Rohingnya telah menjadi salah satu pemicu utama terjadinya konflik antar etnis di Myanmar. Kelompok mayoritas yang berasal dari etnis Rakhine yang tentunya menguasai segala sendi kehidupan mulai dari aspek sosial, pemerintahan dan bahkan sampai militer secara tegas menyatakan bahwa etnis Rohingnya sebagai kelompok imigran gelap dan bukan bagian dari etnis-etnis yang ada dan diakui oleh pemerintah Myanmar. Sehingga tidak mengherankan apabila kelompok mayoritas (etnis Rakhinee) dengan segala dukungan dan kekuasaan yang dimilikinya berusaha menyingkirkan atau bahkan menghapuskan eksistensi etnis Rohingnya dari wilayah Myanmar.

Mengutip laporan hasil invetigasi yang dilakukan oleh kantor berita *Reuters* mengungkapkan bahwa kelompok mayoritas etnis Rakhine secara terorganisasi melakukan pembunuhan terhadap kelompok etnis Rohingya. *Reuters* menyatakan, aksi pembunuhan tersebut dilakukan oleh kelompok nasionalis Rakhine yang mendapatkan dukungan dari aparat pemerintah setempat. Salah satunya adalah serangan yang dilakukan kelompok Rakhine yang beragama Budha pada desa Yin Thei yang ditinggali oleh kelompok muslim Rohingya yang terjadi pada hari Selasa, 6 November 2012.⁶⁹

⁶⁹ <http://international.okezone.com/read/2012/11/12/411/717162/pembunuhan-etnis-rohingya->, diakses 31 Januari 2013.

Kelompok Rakhine mengepung desa tersebut dengan menggunakan perahu pada pagi hari dan melancarkan serangan kepada warga desa pada sore harinya. Dalam serangan itu kelompok Rakhine melakukan pembunuhan kepada warga yang tinggal di desa Yin Thei, termasuk juga wanita dan anak-anak. Mereka juga membakar rumah-rumah yang berada di sana. Saksi mata menyebutkan bahwa pihak kepolisian juga ikut membantu serangan tersebut. Pihak kepolisian dilihat oleh saksi mata menembakkan senjatanya ke arah warga desa. Dibakarnya desa mereka membuat empat ribu etnis Rohingya yang selamat dari serangan mau tidak mau mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman.

Pemerintah Myanmar menolak tuduhan bahwa aparatnya terlibat dalam serangan. Kelompok nasionalis Rakhine juga menyangkal bahwa pihaknya selama ini mengorganisasi serangan terhadap Muslim Rohingya. Mereka menyebut konflik yang terjadi bersifat sporadis dan tidak ada pihak yang mengaturnya. Akan tetapi, ketua Partai Nasionalis Demokratik Rakhine (RNDP), Oo Hla Saw, tidak memungkiri bila ada anggota partainya yang berpartisipasi dalam serangan itu. Oo Hla Saw sendiri menyatakan bahwa konflik terjadi akibat kegagalan pemerintah dalam menghentikan rumor yang beredar di masyarakat. Ia menyatakan warga Rakhine menganggap kelompok etnis Rohingya bermaksud ingin mendirikan negara Islam di daerah tersebut. Keinginan tersebut tentu menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan dominasi etnis Rakhine sebagai kelompok mayoritas yang paling berpengaruh di Myanmar. Padahal, etnis Rohingnya tidak memiliki cita-cita sedikitpun

untuk memisahkan diri dari Myanmar, akan tetapi mereka hanya menginginkan adanya pengakuan secara resmi oleh negara mengenai status kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai bagian dari bangsa Myanmar dengan segala hak dan kewajiban yang sama seperti etnis-etnis lainnya di Myanmar.⁷⁰

Sebagai wujud sikap kebencian dan permusuhan yang mendalam etnis Rakhinee terhadap etnis Rohingya, maka pemimpin etnis Rakhine terus mendesak kepada Pemerintah Myanmar dan penguasa militer untuk mengusir etnis Rohingya dari wilayah Myanmar sebagai satu-satunya solusi terbaik mengakhiri konflik etnis tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Myanmar yang pada akhirnya menuai protes dan kecaman keras dari dunia internasional.⁷¹

4. Biksu dan Pendeta Budha Myanmar

Tuntutan yang lain juga datang dari para Biksu Myanmar. Biksu yang seharusnya sebagai tokoh agama (Budha) mampu menjadi penyejuk dan mendamaikan kelompok etnis yang bertikai justru mendukung langkah Pemerintah Myanmar untuk mengusir etnis Rohingya dari wilayah Myanmar sebagai solusi terbaik mengakhiri konflik komunal tersebut. Tuntutan para biksu tersebut salah satunya tercermin dalam aksi demonstrasi yang dilakukan pada hari Minggu 2 September 2012. Aksi para biksu ini tentunya semakin memperburuk upaya sentimen anti-Rohingya pasca kerusuhan antar etnis di negara bagian Arakan, akhir Juni 2012. Dalam aksinya, para biksu memajang

⁷⁰<http://international.okezone.com/read/2012/11/12/411/717162/pembunuhan-etnis-rohingya-berlangsung-terorganisir>, diakses 31 Januari 2013

⁷¹ *Ibid*, 31 Januari 2013.

spanduk bertuliskan 'Selamatkan tanah airmu Myanmar dengan mendukung Presiden'. Para demonstran juga mengecam utusan PBB Tomas Ojea Quintana yang dituding lebih membela Muslim Rohingya dalam penyelesaian konflik di Arakan. Koordinator aksi, Wirathu, menyatakan demonstrasi ini merupakan pernyataan tegas para biksu menolak keberadaan etnis Rohingya di Myanmar.⁷²

Selain dari para biksu, para pendeta Budha juga melakukan unjuk rasa pada 15 oktober 2012⁷³ Aksi mereka diniatkan untuk melawan organisasi Islam dunia, OIC, membantu muslim Rohingya. Unjuk rasa mereka adalah untuk menentang Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) yang akan mendirikan kantor perwakilannya di negara bagian Rakhine. Kawasan ini merupakan tempat munculnya kekerasan Juni 2012 yang melibatkan etnis Buddha Rakhine dengan muslim Rohingya. Hanya selang beberapa jam setelah unjuk rasa para pendeta ini bubar, kantor Kepresiden Thein Sein mengeluarkan pengumuman bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan OIC mendirikan kantor perwakilannya di Myanmar. Alasan pemerintah tidak begitu jelas, tentang apakah pelarangan itu terkait dengan protes para pendeta atau ada rencana lain. "Pemerintah tidak akan mengizinkan pembukaan kantor OIC karena tidak sesuai dengan keinginan rakyat," jelas pernyataan pemerintah yang diunggah melalui sebsite.

⁷² *Biksu Myanmar desak Muslim Rohingya diusir*, Republika, 3 September 2012

⁷³ *Pendeta Budha Myanmar Protes Organisasi Islam OIC*, Tempo Dunia, <http://www.tempo.co/read/news/2012/10/15/118435844/Pendeta-Budha-Myanmar-Protes-Organisasi-Islam-OIC>, 15 Oktober, 2012

Dalam unjuk rasa tersebut ribuan pendeta berkumpul di dua kota besar, yakni di Yangon dan Mandalay. Beberapa di antara mereka membawa plakat berbunyi "Enyahlah OIC" dan "Tolak OIC" seraya menyatakan bahwa mereka akan terus berunjuk rasa hingga pemerintah setuju dengan tuntutan mereka.⁷⁴

"OIC hanya untuk kaum Bengali, bukan untuk kami," kata pendeta Pyin Nyar Nanda di tengah-tengah suasana unjuk rasa. Kemarahan dan ketakutan masih membara di antara kaum Rohingya dan etnis Buddha Rakhine setelah terjadi perkelahian dan penyerangan menggunakan senjata tajam yang menyebabkan sedikitnya 77 orang tewas dan puluhan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal.⁷⁵

Seorang delegasi dari OIC berkunjung ke negara bagian Rakhine akhir bulan lalu setelah sejumlah negara-negara Islam meminta perhatian dunia mengenai kesejahteraan kaum Rohingya melalui lembaga PBB.

5. Mahasiswa Myanmar

Pada hari Rabu, 24 Oktober 2012 ratusan mahasiswa di ibukota negara bagian Rakhine, menggelar demonstrasi menolak keberadaan Muslim Rohingya. Para mahasiswa ini mendesak presiden U Thein Sein untuk kembali ke rencana awal untuk mengusir etnis Muslim Rohingya yang berada dinegara tersebut.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Mahasiswa Myanmar Tolak Muslim Rohingya*, Republika, 25 Oktober 2012

6. Koorporasi Asing

Akan tetapi, aspek penting yang perlu dicermati mengenai terjadinya konflik komunal yang sarat dengan isu-isu SARA adalah adanya agenda multinasional yang berbasis kepentingan kapitalis dan liberalisasi. Sebab, fakta sejarah menunjukkan bahwa banyaknya ditemukan agenda kaum kapitalis dengan mengatasnamakan perusahaan multinasional untuk menguasai sumberdaya alam dan kepentingan pasar dengan memanfaatkan konflik komunal. Konflik etnis Islam Rohingya di Myanmar, harus dipotret dalam foto yang lebih besar. Fokus harus diarahkan pada Arakan, daerah basis Suku Rohingya. Di Arakan ini, ada kandungan minyak dan gas bumi yang cukup melimpah. Beberapa perusahaan Asing seperti Total, Perancis, Chevron, Amerika Serikat, Petro China, Cina, Tiongkok Petroleum, Petronas Malaysia, dan PTT Thailand, saling berebut dan incar Arakan yang punya nilai strategis.⁷⁷

Amerika Serikat, sepertinya merasa ketinggalan kereta dalam pertarungan merebut *the winning coalition* dalam menguasai struktur domestik Myanmar. Karena kalah dalam mengakses rejim militer Presiden Than Swe. Maka, isu HAM kemudian dikelola sebagai isu untuk menembus blokade wilayah strategis ini dengan dalih ada pelanggaran HAM di Myanmar, khususnya Arakan. Maka itu kondisi obyektif Arakan yang rawan untuk dipicu perbenturan antara etnis Islam Rohingya dan warga Budha di daerah ini. Sejatinya bukan *Muslim Cleansing*, tetapi *People cleasing* terhadap

⁷⁷ http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8930&type=2#.UQoSqx1fGZU, diakses 31 Januari 2013.

masyarakat Myanmar. Yang muaranya adalah untuk memaksa rejim militer menegosiasikan ulang berbagai kesepakatan strategis di bidang ekonomi.⁷⁸

Skema konflik Rohingya mengarah pada konflik peradaban dengan desakan untuk menghantam pola rezim Myanmar sendiri. Jika dianalisa lebih jauh, ada permainan korporasi tertentu yang berkolaborasi dengan Junta militer. Bentuk kolaborasi tersebut dapat dianalisa berdasarkan kronologis terjadinya konflik antar etnis tersebut. Pada tahun 1988, muncul sistem baru di Myanmar. Walaupun rezim otoriter militer yang memimpin, tapi Myanmar menggunakan sistem pasar. Ketika itu ada undang-undang baru yang namanya *The Union of Myanmar Foreign Investment Law*. Payung hukum ini adalah perlindungan terhadap sektor eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas alam yang melibatkan korporasi-korporasi asing.⁷⁹

Pada kasus Arakan ini adalah pertarungan soal minyak dan gas bumi. Pada tahun 2005, perusahaan gas Cina menandatangani kontrak gas dengan pemerintah Myanmar untuk mengelola eksplorasi minyak. konflik-konflik horizontal menandakan ada sesuatu yang yang diincar dari sisi geopolitik. Yang menarik dari sisi rezim militer di Myanmar dari era Ne Win hingga sekarang ini, ternyata melibatkan perusahaan asing semacam Chevron AS maupun Total Perancis, padahal kedua negara ini kan di permukaan mengangkat isu hak asasi manusia. Jelas ada pertarungan bisnis yang bermain melalui pintu belakang dari rezim militer Myanmar. Konflik soal Islam dan Budha yang belakangan ini semakin memanas, bahkan ada statement Presiden

⁷⁸ *Ibid*, 31 Januari 2013.

⁷⁹ <http://ahmadsamantho.wordpress.com/2012/07/18/agenda-tersembunyi-di-balik-tragedi-rohingya-myanmar/>, diakses 31 Januari 2013.

Myanmar yang kontroversial dengan mengatakan, “Udah saja Rohingya itu diusir dari Myanmar,” menunjukkan bahwa masalah ini hanya dilihat sebagai hilir saja, hulunya adalah adanya satu hal yang diincar di Arakan yaitu minyak dan gas alam.⁸⁰

Di Arakan, setidaknya dua perusahaan minyak Cina, sudah menandatangani MOU dengan rejim militer Myanmar, untuk mengeksplorasi dan penambangan di Arakan. Jadi dalam konteks memicu konflik Islam-Budha di Myanmar, sebenarnya dalam skema global ini, masyarakat Birma lah yang jadi korban sebenarnya. Tentu saja karena sasaran utama kali ini adalah Arakan, maka suku Rohingya jadi target operasi. Namun warga Budha pun, juga jadi korban. Karena skema besarnya, korbankan masyarakat Birma, demi kesepakatan rejim militer dan para pelaku korporasi raksasa Asing di Myanmar. Ini sebenarnya sudah terjadi sejak 1988, ketika OFrejim Militer Myanmar, mengeluarkan sebuah payung hukum buat melindungi investor asing dalam kerangka *Union of Myanmar Foreign Investment Law*. Modus dari rezim militer memproteksi korporasi model Total, Chevron, Petrochina dan lain-lain, tidak dilakukan dengan cara-cara yang ekstrim seperti pembakaran desa-desa, akan tetapi menerapkan kebijakan pembersihan etnis (*People Cleansing*) yang paling efektif tanpa melibatkan penguasa yaitu dengan mencetusnya konflik agama.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*, 31 Januari 2013.

⁸¹ *Ibid*, 31 Januari 2013.

7. Etnis Rohingya

Pada tahun 1936, muslim Burma membentuk sebuah aliansi bernama *General Council of Burma Moslem Associations* (GCBMA). Aliansi ini bertujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat muslim di masa kemerdekaan Burma, terutama jaminan khusus status keanggotaannya di parlemen. Selain itu organisasi ini juga menjaga agama, budaya, dan status hukum komunitas muslim, baik yang pribumi, imigran, maupun muslim hasil kawin campur. Organisasi ini diutamakan dipimpin oleh muslim yang memiliki latar belakang minimal punya satu orang tua asli Burma. Namun upaya GCBMA ini tidak mendapat respon positif dari colonial Inggris, demikian juga dengan masyarakat nasionalis Budha Burma, mereka tidak memberikan jaminan tersebut pada kaum muslim.⁸²

Pada bulan agustus 1948, delapan bulan setelah kemerdekaan, terjadi kekacauan yang luar biasa. Banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan, seperti Komunis Bendera Merah (Red Flag Communist), Komunis Bendera Putih (White Flag Communist) dan White Comrade. Mereka merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah karena tidak bisa menentukan daerahnya sendiri, seperti yang diharapkan dibebepara ras lain, yaitu, Shan, Kachin, dan Karen.⁸³

Muslim Rohingyapun dirugikan dengan status mereka dalam pemerintahan nonmuslim, ketika pejabat-pejabat Islam digantikan oleh orang-

⁸² Riza Sihbudi, dkk., *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya* (Jakarta: PPW-LIPI, 2000), hal. 177

⁸³ Kyaw Zan Tha, *Background of Rohingya Problem*, <http://rakhapura.com/read.asp?id=4&a=scholarseolumn>, di akses pada 17 Maret 2013

orang Budha. Melihat keadaan ini, muslim Rohingya memanfaatkan kesempatan dari aksi gerakan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan komunis. Mereka menuntut berdirinya negara otonom. Namun pemerintah menolak. Akibatnya, gerakan komunis mencabut dukungan mereka untuk AFPFL (Anti-Fascist People's Freedom League) dan memilih Arakan National Union Organization (ANUO) dalam pemilihan.⁸⁴

Pada awal timbulnya pemberontakan, banyak pimpinan-pimpinan Islam yang berkhotbah tentang pembelaan terhadap Islam atau melakukan jihad ketika ada yang menyerang hak serta wilayah umat Islam. Dalam keadaan yang penuh kekerasan, arakan sangat terpengaruh oleh pemimpin pergerakan setempat yang merupakan pemimpin Mujahid. Sejak adanya saling ketergantungan antar pemberontak, tanpa bisa dihindari, ada kolusi antar mereka, dalam persenjataan dan penyelundupan beras. Akan tetapi, secara keseluruhan antara muslim Arakan yang memberontak dan pihak Rohingya selalu diliputi rasa curiga, bahkan terjadi konflik terbuka. Hal ini membuat pemberontakan Mujahid dianggap sebagai gejala konflik internal arakan yang juga merupakan tantangan bagi pemerintah pusat.⁸⁵

Antara tahun 1960-1962, masyarakat Rohingya berjuang memperbaiki status Arakan. Pada waktu pemilihan umum April 1960, U Nu berjanji jika partainya menang pemilu, dia akan menjadikan Arakan sebagai wilayah negara bagian yang otonom dan sejajar dengan negara-negara bagian lainnya dibawah persatuan Burma. Setelah mencapai kemenangan U Nu membentuk komisi

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Clive J. Christie, *A Modern History Southeast Asia Decolonization, Nationalism & Separatism*, London : Tauris Academic Studies, 1996, hal. 165

yang bertugas mengumpulkan segala permasalahan dan aspirasi muslim Arakan.⁸⁶

Pada tahun selanjutnya, U Nu memenuhi janjinya setelah Regional autonomy commission tahun 1948, mengumumkan pembentukan negara Mon dan Arakan, yang akan diselesaikan pada tahun 1962. Akan tetapi, kelompok Mujahid yang tidak puas meneruskan pemberontakan untuk memaksa dan meminta hak beragama Islam.⁸⁷

Namun setelah terjadi kudeta dibawah pimpinan Ne Win pada maret 1962, rezim baru Burma tersebut membatalkan rencana pembentukan negara bagian Arakan dan membubarkan gerakan Mujahid. Hingga kini cita-cita untuk membentuk wilayah Arakan yang otonom masih terkatung-katung. Arakan masih tetap berada dibawah kontrol represif dari pemerintahan militer Burma.⁸⁸ Bahkan hingga saat ini warga Arakan tidak berhenti untuk menuntut pemerintah demi memperjuangkan hak-haknya atas tindak penindasan, pelanggaran HAM, dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas etnis Rakhine dengan dukungan penuh negara dan militer Myanmar, maka etnis Rohingnya terus berjuang untuk menyuarakan tuntutan, yang antara lain.⁸⁹

1. Mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembantaian dan kekerasan terhadap muslim Rohingnya.

⁸⁶ Riza Sihbudi, *Op cit.*, hal.155

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*, hal. 158

⁸⁹ <http://politik.kompasiana.com/2012/08/23/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan>, diakses pada 1Februari 2013

2. Pemerintah Myanmar harus mengakui hak etnis Rohingya atas kewarganegaraan Myanmar.
3. Proses politik dan Demokrasi harus bersifat terbuka dan setara bagi semua etnis termasuk bagi etnis Rohingya.
4. Etnis Rohingya harus diperlakukan secara sama dan setara di Arakan dan Myanmar. Hak-hak dan kebebasan mereka harus dihargai dan dijamin oleh negara dan oleh etnis-etnis lain yang hidup di Myanmar.
5. Mendesak PBB dan komunitas internasional serta semua pemerintah negara-negara di dunia untuk menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan serta mengembalikan kedamaian dan keamanan di bumi Arakan.
6. Meminta kepada komunitas internasional dan NGO (Non Government Organization) untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban kekerasan di Arakan.
7. Meminta kepada PBB dan masyarakat internasional untuk menyelenggarakan misi investigasi independen yang imparial dan obyektif terhadap pembantaian massal terhadap etnis Rohingya di Arakan.
8. Mendesak pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasannya untuk menerima pelarian etnis Rohingya yang terancam keselamatan dan keamanannya di Arakan.

9. Meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil inisiatif yang positif dan proaktif sebagai negeri muslim terbesar di dunia, sekaligus sebagai tuan rumah dari Sekretariat ASEAN, untuk penyelesaian krisis Rohingya secara permanen.
10. Mendesak PBB untuk segera melakukan intervensi kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah lahirnya pembunuhan baru, kekerasan, kerusakan dan perkosaan demi pemeliharaan kedamaian dan keamanan.

B. Sikap Partai Politik Terhadap Konflik Rohingya

Myanmar merupakan sebuah negara yang tingkat demokrasinya rendah. Hal ini dapat dilihat di negara Myanmar partai oposisi tidak diperbolehkan. Di Myanmar partai yang boleh ada, hanya yang merupakan kaki tangan militer. Bahkan pada pemilu 1990 pemerintah pernah tidak mengakui kemenangan partai oposisi NLD. Bahkan pimpinan NLD, Aung San Suu Kyi menjadi tahanan rumah sejak tahun 1992. Kemudian setelah pemilu tahun 1990, Jenderal Saw Maung mengundurkan diri tahun 1993 dan digantikan oleh Jenderal Than Shwe. Setelah kemenangan NLD, SLORC menahan 262 aktivis NLD pada bulan Mei 1996 lalu, karena para aktivis ini mencoba untuk menyelenggarakan kongres NLD yang pertama sejak mereka memenangkan pemilu 1990. Sehingga tidak heran, jika Myanmar dikategorikan sebagai negara yang paling buruk dalam penegakan demokratisasi di kawasan Asia

1. **Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan (USDP)**

Partai berkuasa di Myanmar saat ini adalah Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang juga diketuai oleh Presiden Myanmar U Thein Sein dan didominasi oleh etnis Burma. sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa sikap pemerintah terhadap konflik Rohingya masih pasif dan melakukan pembiaran serta mendukung pembersihan etnis di Myanmar.

Presiden Myanmar Thein Sein, mengatakan 800 ribu penduduk Rohingya harus ditempatkan di sejumlah kamp dan dikirim (kembali) ke Bangladesh melalui perbatasan. Presiden Thein Sein menolak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Pemerintah Bangladesh mengaku kewalahan dan tak mampu menerima limpahan pengungsi Rohingya di negerinya; bahasa kasarnya, menolak kedatangan etnis Rohingya dari Myanmar.⁹⁰

Kondisi ini telah memaksa Muslim Rohingya mengungsi mencari tempat aman. Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwi mengatakan bahwa pemerintah Myanmar menerapkan tindakan maksimal untuk menghentikan kekerasan antar etnis di Rakhine; pertikaian yang terjadi Rakhine antara Etnis Rohingya dan etnis atau pun suku-suku setempat (asli/pribumi) Myanmar. Pemerintah Myanmar juga membantah tuduhan bahwa aparat keamanan menyiksa dan menangkapi pengungsi Muslim Rohingya. Justru, mencoba meredakan kekerasan dan konflik di wilayah Rakhine tersebut. Myanmar menolak tuduhan beberapa pihak yang mengatakan bahwa petugas menggunakan kekerasan dan penganiayaan dalam mengatasi keadaan, tuduhan

⁹⁰ http://www.mizan.com/news_det/mengenal-etnis-rohingya-dari-sudut-pandang-sejarah.html, diakses 17 Oktober 2012

tersebut bertujuan untuk mempolitisir dan mengarahkan isu di Rakhine sebagai konflik agama. Penolakan pengakuan Pemerintah Myanmar terhadap eksistensi etnis Rohingya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara Myanmar dan kebijakan marginalisasi yang membatasi akses dan ruang gerak (kebebasan) etnis Rohingya inilah yang menjadi akar persoalan terjadinya konflik komunal etnis Rohingya di Myanmar.

Sikap kebencian dan permusuhan yang berujung pada tindakan genosida dan pelanggaran HAM oleh etnis Rakhine mempunyai hubungan erat dengan kebijakan kolonial sejak penjajahan Inggris di Myanmar. Genosida dan pengusiran umat Muslim Rohingya sudah dilakukan sejak kesultanan Islam yang mana masyarakat Rohingya dikenal telah memeluk Islam sejak masa pemerintahan Islam Umar bin Abdul Aziz. Maka cara Inggris menekan orang-orang Islam adalah dengan memakai orang-orang Budha. Kebijakan kolonial ini kemudian dilanjutkan oleh rezim militer yang berkuasa di Myanmar. Mereka menyerukan sikap anti Islam untuk menyatukan masyarakat Budha dan menjadikan Islam sebagai musuh bersama. Sehingga, tidak mengherankan apabila Aung Sang Su Kyi yang dikenal sebagai pejuang HAM memilih diam dalam kasus Rohingya.

Namun, disamping sikapnya yang menolak mengakui etnis Rohingya ia pun berjanji akan mengupayakan lapangan kerja bagi delapan ratus ribu etnis Rohingya yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik di negara bagian Arakan beberapa bulan lalu.⁹¹

⁹¹ Presiden Myanmar: Perbaiki Perlakuan pada Muslim Rohingya, *Republika*, 22 Oktober 2012

2. Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD)

Kapasitas politik kelompok prodemokrasi juga masih lemah. NLD misalnya, walaupun berhasil memenangkan pemilu sela anggota Majelis Rendah 2010, struktur organisasi mereka masih sangat jauh untuk disebut organisasi modern. Struktur partai hanya terdiri atas beberapa orang dalam central committee, tanpa ada bagian dan hierarki ke tingkat regional dan lokal.

Sementara itu partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ini, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang notabene pejuang HAM dan demokrasi masih saja diam. Suu Kyi awalnya terkenal sebagai sosok pembela Hak Asasi Manusia karena telah melalui tahun-tahun panjang di penjara dan isolasi. Kini ia dituduh mengabaikan masalah manusia yang paling mendesak di Myanmar.

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi menolak untuk berbicara atas etnis Rohingya. Dirinya enggan menggunakan "kepemimpinan moral" untuk mendukung dua pihak yang bertikai dalam konflik antar etnis Rohingya dan Rakhine. "Saya lebih memilih untuk mengutamakan toleransi. Tetapi, saya kira satu pihak tidak perlu mengandalkan satu kepemimpinan moral. Hal ini sama saja mengatasi masalah tanpa melihat sumber dari masalahnya," ujar Suu Kyi seperti dikutip BBC, Minggu (4/11/2012) "Saya tidak bisa berbicara atas nama Rohingya. Saya sadar bahwa ada beberapa pihak yang menginginkan saya untuk berpihak pada salah satu kelompok. Mereka akan kecewa karena saya tidak akan berdiri pada salah satu pihak," tegasnya. Menurut Suu Kyi, aturan hukum harus ditegakkan terlebih dulu untuk

mengatasi konflik ini. "Bila rakyat saling bunuh dan saling bakar tempat tinggal, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini?" ucap Suu Kyi.⁹²

Direktur eksekutif Kampanye Burma di Inggris, Anna Roberts mengatakan, ia kecewa akan sikap Suu Kyi yang tidak transparan menghadapi kasus Muslim Rohingya di Myanmar. "Ini mengecewakan, dia berada dalam posisi sulit, tetapi orang telah kecewa dengan sikapnya," ujar dia.⁹³

Suu kyii diduga khawatir akan kehilangan dukungan bagi partainya dalam pemilu 2015 mendatang. Beberapa analis mengatakan, kelambanan Suu Kyi terhadap kasus Rohingya bermotif politik. Sebab Liga Nasional Demokrasi berencana maju pada pemilihan umum di Myanmar 2015 mendatang. Analis mengatakan, Suu Kyi takut bahwa apabila ia mendukung minoritas Muslim Rohingya akan membahayakan bagi kampanyenya.⁹⁴

⁹² Fajar Nugraha, "Suu Kyii Enggan Dukung Etnis Rohingya"

<http://jakarta.okezone.com/read/2012/11/04/411/713360/suu-kyi-enggan-dukung-etnis-rohingya>

⁹³ Analisi: Suu Kyi Takut Muslim Rohingya Bahayakan Karir Politiknnya, *Republika*, 27 Juli 2012

⁹⁴ *Ibid*